ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PROSES PERIZINAN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BONE: PERSPEKTIF STUDI KELAYAKAN BISNIS

Fitrani¹, Andi Aqilah Fadilah², Irman Susanda³, Hasni⁴

fiitriianiii27@gmail.com¹, andiaqiafadilah@gmail.com², irmanbone46@gmail.com³,
hasni.abdsalam@gmail.com⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam proses perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dalam konteks studi kelayakan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan hukum yang utama meliputi .Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, pelatihan intensif bagi petugas perizinan, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam proses perizinan yaitu adanya jaringan yang kurang mendukung yang membuat program tersebut kadang lambat dan eror dalam bekerja. Selain itu mengenai tantangan hukum tidak terlalu ada tantangan yang besar akan tetapi tantangan tersebut berasal dari komitmen dari pihak pelaku usaha terlibat dalam proses perizinan usaha serta persyaratannya dan juga dipengaruhi oleh pemohon yang biasanya belum terlalu paham mengenai informasi yang ada dalam proses perizinan.

Kata Kunci: DPMPTSP, Perizinan, Studi Kelayakan Bisnis, Aspek Hukum.

PENDAHULUAN

Perizinan usaha merupakan elemen krusial dalam studi kelayakan bisnis karena menjadi dasar legalitas operasional suatu kegiatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi ujung tombak pelayanan perizinan yang terintegrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, proses perizinan kerap menemui berbagai kendala, khususnya dari aspek hukum.

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan regulasi perizinan yang efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus pada identifikasi tantangan hukum dalam proses perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bone dan implikasinya terhadap kelayakan bisnis. Menurut (Ridwan, 2022) dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Kontemporer, perizinan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang bersifat diskresioner namun tetap dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan pelayanan yang baik. Dalam konteks reformasi birokrasi digital, perizinan harus menyesuaikan dengan prinsip kecepatan dan kepastian hukum berbasis sistem elektronik seperti OSS.

Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji karena jika berdasarkan analisis aspek hukum sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha (Aldy et al., 2017). Legalitas usaha juga menjadi syarat utama untuk mengakses modal, pembiayaan, dan kerja sama bisnis formal. Akan tetapi hal tersebut yang harus dikarenakan pelaku usaha memiliki cara berbeda untuk melakukannya dengan aspek lainnya, tergantung kesiapan usaha tersebut. Aspek

hukum itu sendiri bertujuan untuk meneliti keabsahan dokumen yang dimiliki dalam suatu usaha, apakah dokumen tersebut telah sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen tersebut.

Kesesuaian dokumen juga merupakan salah satu syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum melakukan sebuah usaha yang bertujuan agar bisnis tersebut mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta memenuhi persyaratan dalam melakukan bisnis (Nurrosadi & Musadad, 2024). Hal tersebut penting karena dalam memulai sebuah usaha, segala prosedur yang berkaitan dengan izin serta segala persyaratan yang harus dipenuhi seperti izin usaha ataupun dokumen yang mendukung kegiatan usaha. Kegagalan dalam aspek hukum ini yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena biasanya ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna (Kasmir & Jakfar, 2012).

Dari kajian teori, salah satu faktor yang mendorong usaha kecil adalah izin usaha. Industri kecil umumnya masih digolongkan sebagai usaha dengan pendapatan rendah dan modal sedikit, sehingga izin usaha yang dimiliki juga bersifat fleksibel dan tidak selalu diwajibkan. Usaha ini biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, apabila ada niatan untuk mengembangkan usaha, mendapatkan surat izin adalah modal awal yang diperlukan sebagai bentuk kepatuhan hukum tentang izin usaha (Nurwayakkuba & Hasni, 2023).

Aspek hukum dari studi kelayakan Bisnis sangatlah penting dikarenakan hal tersebut secara langsung terkait dengan legalitas dan keberlanjutan bisnis. Studi Kelayakan Bisnis adalah kegiatan yang menentukan apakah perusahaan layak memimpin. Kegiatan ini mencakup menentukan masalah, menentukan peluang, target, menjelaskan situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat dan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, lebih baik jika pengusaha perlu memahami kelebihan dan kekurangan dari kegiatan ini. Saat melakukan studi kelayakan, beberapa aspek perlu diperiksa salah satunya adalah aspek hukum, karena ini berkaitan dengan hal-hal apa pun yang berkaitan dengan legalitas atau ketentuan hukum Perusahaan atau pendiriannya. Jika perusahaan didasarkan pada aspek hukum, dinyatakan layak jika ide bisnis sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat memenuhi semua persyaratan perizinan lokal (Mariska, 2024).

Dalam studi kelayakan Bisnis, aspek hukum mencakup semua masalah yang terkait dengan legalitas rencana bisnis yang harus diterapkan sesuai dengan peraturan, tergantung pada jenis bisnis atau kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan prosedur untuk mendapatkan Izin untuk persetujuan hukum di Indonesia. Menurut Pasal 1 No. 10 PP No. 7 tahun 2021, Perizinan Usaha adalah legalitas yang membuatnya tersedia untuk personel bisnis untuk melakukan kegiatan perusahaan. Pasal 37 PP no. 7 tahun 2021 menyatakan bahwa usaha harus Mempunyai dan memerlukan yang namanya Izin (Faziani & Rohman, 2024). Jenis-jenis studi kelayakan untuk aspek ekonomi dan hukum bukan hanya bentuk, tetapi menjadi fondasi utama yang memastikan kepastian hukum dan perlindungan usaha. Kepatuhan terhadap aspek hukum juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan daya saing di pasar.

Aspek hukum sendiri memainkan peran penting dalam memastikan legalitas bisnis dan keberlanjutan. Dalam konteks usaha, memiliki dokumen hukum seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha mikro mencerminkan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga membangun

kepercayaan konsumen dan mitra bisnis (Sugiharto & Putri, 2024). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu sektor yang bekerja salah satunya dalam proses penerbitan izin usaha yang didalamnya terdapat banyak jenis izin yang diterbitkan mulai dari izin usaha berisiko rendah sampai usaha berisiko tinggi.

Berdasarkan data dari DPMPTSP, terdapat 5.079 NIB yang terbit ditahun 2024 dan terdapat 382 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan diberbagai kecamatan dibulan Januari 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah melakukan usahanya secara legal. Akan tetapi dalam hal ini, tentu dalam proses perizinan usaha tersebut terdapat tantangan hukum yang dilalui oleh DPMPTSP. Meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah perizinan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan teknis seperti sistem yang kompleks dan kurangnya integrasi data antar instansi, yang menghambat proses perizinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Irna et al., 2024) yang mengenai penyuluhan terhadap UMKM mengenai aspek hukum mengatakan bahwa pemerintah mewajibkan semua jenis bisnis untuk memiliki izin usaha tidak kerkecuali bisnis UMKM juga wajib memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). dalam penelitian (Wadu et al., 2025) meneliti mengenai aspek hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dayantri, 2022) mengenai pengimplementasian OSS pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di provinsi Sumatra Utara yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian (Yudani et al., 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena mampu mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, sederhana, dan cepat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai objek penelitian, lokasi penelitian serta tujuan dari penelitian tersebut. yang dimana membahas tentang aspek hukum terkait dengan penyuluhan terhadap UMKM mengenai Izin Usaha, meneliti aspek hukum terkait pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan serta pengimplementasian OSS dalam Proses Perizinan. Adapun terkait persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu masing-masing meneliti mengenai izin usaha.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tantangan hukum dalam proses perizinan usaha berdasarkan studi kelayakan bisnis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menjadi penghambat kepatuhan hukum dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan legalitas dan keberlanjutan usaha dan juga meningkatkan implementasi aspek hukum melalui studi kelayakan Bisnis, Berharap bahwa usaha akan berkembang secara hukum, berkelanjutan dan bersaing di era globalisasi.

Lokasi penelitian dipilih di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Bone yang merupakan salah satu tempat untuk melakukan atau mengurus berbagai perizinan yang terletak di kabupaten bone. Lokasi ini dipilih karena dalam melakukan Proses Perizinan, tentu DPMPTSP melalui berbagai tantangan yang relevan yang sesuai dengan konteks penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang memberikan gambaran komprehensif tentang Proses Perizinan di DPMPTSP.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pendukung dan pelaku usaha dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan serta mengajak kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha ataupun legalitas untuk dapat memenuhi aspek hukum. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian tentang aspek hukum mengenai perizinan usaha dalam studi kelayakan bisnis di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis tantangan Hukum yang dihadapi dpmptsp dalam melakukan Proses perizinan usaha hukum berdasarkan studi kelayakan bisnis. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam permasalahan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan di kantor DPMPTSP Kabupaten Bone dan melibatkan beberapa pihak terkait pihak yang terlibat dalam proses perizinan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui lebih dalam mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam implementasi proses perizinan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam aspek hukum seperti dokumen perizinan usaha. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap terfokus pada isu tantangan hukum dalam proses perizinan usaha dan studi kelayakan bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan sektor yang bergerak di bidang penanaman modal dan perizinan. DPMPTSP saat ini terletak di Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone Lantai 3, Jl. Petta Ponggawae No. 4 Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. DPMPTSP ini bertugas untuk memfasilitasi investasi dan penyelenggaraan izin usaha serta layanan publik terpadu di wilayah kabupaten Bone. DPMPTSP kabupaten Bone juga berfungsi sebagai tempat pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menangani berbagai jenis izin usaha seperti izin lokasi, izin praktek, izin penelitian dan berbagai jenis izin usaha lainnya yang prosesnya dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Narasumber bernama Nabil (2025) yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses perizinan. Terdapat beberapa izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP melalui sistem OSS seperti izin usaha, izin praktek dan izin usaha lainnya yang sekarang ini dikenal sebagai izin usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu

identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berfungsi sebagai tanda pengenal legal usaha, sekaligus berlaku sebagai izin usaha, izin lokasi dan izin operasional. NIB diberikan kepada pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan dan menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai fasilitas layanan publik dan legalitas lainnya. Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone menerbitkan 5.079 izin usaha NIB dengan pelaku usaha seperti pedagang eceran dan pelaku industri.

Tentu saja dalam proses perizinan usaha tersebut terdapat tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP dalam hal ini pihak yang terlibat langsung dalam proses perizinan usaha yang bernama Nabil mengatakan: “proses penerbitan NIB sebenarnya mudah karena hanya membutuhkan kurang lebih 5 menit untuk melakukan proses perizinan usaha NIB melalui OSS, namun kadang terhalang dengan jaringan yang kurang mendukung yang membuat program tersebut kadang lambat dan eror dalam bekerja. Selain itu mengenai tantangan hukum tidak terlalu ada tantangan yang besar akan tetapi tantangan tersebut berasal dari komitmen dari pihak pelaku usaha terlibat dalam proses perizinan usaha serta persyaratannya dan juga dipengaruhi oleh pemohon yang biasanya belum terlalu paham mengenai informasi yang ada dalam proses perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha yang bernama Ratih yang merupakan pedagang minuman dan makanan mengatakan bahwa “saya tidak memiliki izin usaha karena saya menganggap izin tersebut tidak terlalu penting bagi saya yang hanya memiliki usaha kecil-kecilan”. Pelaku usaha ini menganggap dengan tidak adanya izin usaha tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan usahanya. Sedangkan dalam aspek hukum ini, izin usaha sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha membuat pelaku umkm itu tidak terlalu mementingkan izin usaha. Pelaku usaha tersebut selalu mengira bahwa tanpa izin usaha pun tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik tanpa memikirkan usahanya dikemudian hari tanpa adanya izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara persepsi pelaku usaha dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang pentingnya izin usaha bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya izin usaha, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih profesional dan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan perspektif hukum izin usaha merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Izin usaha tidak hanya memberikan legitimasi hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang untuk mengakses fasilitas pemerintah, memperoleh kepercayaan dari konsumen, dan meningkatkan kredibilitas usaha.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, DPMPTSP melakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai pentingnya izin usaha dalam mendirikan sebuah usaha. Selain itu, pelaku usaha dapat mengetahui bahwa dalam menerbitkan izin NIB tidak perlu lagi datang ke dpmptsp untuk mengurus izin karena membuat izin NIB dapat dilakukan melalui sistem OSS secara mandiri. Adapun yang diperlukan dalam mengurus NIB hanya membutuhkan

KTP dan nomor telepon atau email pelaku usaha yang ingin menerbitkan izin NIB. Akan tetapi apabila nantinya dalam mengurus izin usaha seperti usaha yang berisiko menengah rendah, menengah tinggi dan risiko tinggi yang memiliki persyaratan yang sesuai dengan jenis izinnya, sedangkan untuk usaha berisiko rendah hanya memerlukan KTP dan nomor telepon atau email. Berdasarkan proses perizinan usaha Dalam hal ini NIB, regulasi yang digunakan mengacu pada regulasi pusat berdasarkan sektor jenis perizinan.

Untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada pelaku usaha agar proses perizinan berjalan lebih baik yaitu dengan mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang regulasi yang ada dalam proses perizinan usaha di dpmptsp. Yang dimana regulasi tersebut akan mengalami perubahan berdasarkan keputusan sektor tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya mengurus izin usaha serta investasi dan tidak pernah melakukan kerja sama Dengan pelaku usaha ataupun konsultan mengenai kelayakan sebuah usaha untuk dijalankan, hal tersebut dalam mengetahui kelayakan suatu usaha dinilai dari sektor usaha tersebut apakah sektor tersebut layak untuk dijalankan atau tidak, tergantung tim teknis di sektor tersebut.

KESIMPULAN

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tempat dalam melakukan kegiatan investasi serta pelayanan perizinan. Salah satunya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bone yang dalam kegiatannya melakukan berbagai proses perizinan. Jenis Perizinan tersebut diproses melalui sistem OSS (Online Single Submission) dengan menerbitkan Izin. Walaupun dalam melakukan proses perizinan dapat dilakukan dengan mudah secara mandiri tanpa harus datang ke DPMPTSP Kabupaten Bone, akan tetapi masih banyak ditemukan Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.

Dalam penelitian ini, terkait dengan Izin NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam hal ini ditemukan terdapat tantangan hukum yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kabupaten Bone yaitu pihak yang melayani proses perizinan dan penerbitan NIB. Adapun tantangan tersebut mengenai jaringan yang kurang mendukung yang membuat program tersebut kadang lambat dan eror dalam bekerja. Selain itu mengenai tantangan hukum tidak terlalu ada tantangan yang besar akan tetapi tantangan tersebut berasal dari komitmen dari pihak pelaku usaha terlibat dalam proses perizinan usaha serta persyaratannya dan juga dipengaruhi oleh pemohon yang biasanya belum terlalu paham mengenai informasi yang ada dalam proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, R., Purnomo Riawan, & Sugianto, L. O. (2017). Studi Kelayan Bisnis. In *Jurnal Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Bate'e, A. T., Septiani, D. L., Pradana, G., Krisanti, S. R., & Widodasih, R. W. K. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pasar Dan Pemasaran (Studi Kasus Sop Ayam Pak Mim Klaten Di Cikarang Selatan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 221–235.
- Dalimunthe, N., & Thalia, L. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OJEK ONLINE DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner Vol*, 9(1), 195–201.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi

- Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Faziani, M., & Rohman, A. (2024). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(5), 3031–5220.
- Ilham, W. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Pengembangan Umkm Kota Batam Pada Usaha Bunbun Cookies and Cakes. *Jurnal Mata Pariwisata*, 2(2), 58–66.
- Irna, Fadl, A., & Gwijangge, I. (2024). PENYULUHAN ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS BAGI PELAKU UMKM DI DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA. *Jurnal BUDIMAS (ISSN : 2715-8926)*, 6(3), 1–23.
- Kasmir, & Jakfar. (2012). Studi Kelayakan Bisnis (edisi revisi). prenadamedia group.
- Mariska. (2024). aspek hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis. *Kontrak Hukum*. <https://kontrakhukum.com/article/aspek-hukum-dalam-studi-kelayakan-bisnis/>
- Nurrosadi, M. B., & Musadad, H. A. (2024). Analisis Kelayakan Bisnis Pada UMKM Manini Karawang Ditinjau Dari Aspek Hukum, Aspek Pemasaran, Dan Aspek Produksi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14237–14245.
- Nurwayakkuba, & Hasni, H. (2023). MODEL PENGEMBANGAN USAHA GULA AREN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *IEB JOURNAL Islamic Economics and Business Journal*, 5(2), 68–82.
- Ramadhani, F. (n.d.). EFEKTIVITAS PERIZINAN BERBASIS ONLINE DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- Ridwan, H. R. (2022). Hukum Adminitrasi Negara Temporer.
- Spartani, B. G., & Zuliyah, S. (2024). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 157–165.
- Sugiharto, S. S., & Putri, N. B. P. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Hukum Studi Kasus UMKM Getuk Pisang Baariklana. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 201–210.
- Wadu, C. T. M. H., Aprillia, indah S. G., Junika Hutapea, K., Tatsbita, L. S. A., Lysandra, M., Siregar, R. A., Revina, & Khaulah, T. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 449–458.
- Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 2(3), 121. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2008).